



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL HADI**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **465292**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **9.332.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/114 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.660 m2/216 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
4. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, WARISAN Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 232.956 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.640.000.000
6. Tanah Seluas 110.000 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000
7. Tanah Seluas 394 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
8. Tanah Seluas 1.360 m2 di KAB / KOTA BALANGAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 272.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **225.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, WARISAN Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	5.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	399.651.081
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.962.051.081
III. HUTANG	Rp.	1.000.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.962.051.081

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.